



KORELASI

Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi

(No. Volume), Tahun | hlm. x-xx

Tren Analisis Transparansi Laporan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta

Indah Kartika Sandhi^{1*}, Gita Astyka Rahmanda²
indahkartika@upnyk.ac.id, gitaastyka@upnyk.ac.id
*Indah Kartika Sandhi

Abstrak

Laporan keuangan daerah merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah atas kinerja yang telah dilaksanakan. Publikasi laporan keuangan daerah diperlukan sebagai wujud transparansi pemerintah daerah kepada publik. Transparansi laporan keuangan daerah tercermin dari kemudahan akses atas publikasi laporan keuangan daerah di portal pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren kecenderungan transparansi laporan keuangan daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 hingga 2020. Penelitian ini memberikan analisis deskriptif mengenai tren transparansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Data penelitian diperoleh melalui akses website setiap pemerintah daerah. Penelitian ini menemukan bahwa tren transparansi laporan keuangan daerah untuk pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah Kabupaten Sleman dan pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah sangat baik, sedangkan transparansi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul cukup baik dan transparansi pemerintah Kabupaten Bantul kurang baik. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa setiap pemerintah daerah memiliki pola tren yang berbeda dalam transparansi pelaporan keuangannya.

Kata Kunci: Transparansi; Laporan Keuangan Daerah; Tren; Daerah Istimewa Yogyakarta.

Abstract

A report on Local Government Finance is a form of local government responsible for the local government performance. Publication of report on Local Government Finance is a form of local government transparency to the public. Transparency of report on Local Government Finance is reflected in the ease of access to the publication of its report on local government portals. This research aims to analyze the transparency trends of report on Local Government Finance in the Special Region of Yogyakarta from 2018 to 2020. This study provides a descriptive analysis of report on Local Government Finance's transparency in the Yogyakarta Special Region. Research data obtained through access to the website of each local government. This research found that the trend of a report on Local Government Finance's transparency in the Yogyakarta municipality, Sleman, and Kulon Progo was very good, meanwhile the Gunung Kidul's transparency was quite good and the Bantul's transparency was poorly. This study implies that each local government has a different trend pattern in the performing their transparency of its financial reporting.

Keywords: Transparency; Report on local government finances; Trend; DIY.

PENDAHULUAN

Memasuki Era Digital 4.0., perkembangan teknologi kian canggih dan merambah hampir di seluruh lini sektor bisnis. Keberadaan teknologi mempermudah dan mempercepat kinerja pemakai serta memperluas jaringan ketersebaran informasi. Kebutuhan akan akses informasi yang cepat menjadi salah satu tumpuan perubahan dari proses manual menjadi digitalisasi. Pemanfaatan teknologi digital telah diterapkan pada sektor pemerintah daerah. Penerapan teknologi digital di sektor pemerintahan dalam hal percepatan penyebaran informasi menjadi fokus utama pemerintah. Hal ini dikarenakan tugas pokok pemerintah tidak hanya dalam hal menjalankan program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat namun juga melaporkan dan menyebarkan informasi hasil kinerja kepada publik. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan transparansi atau keterbukaan informasi yang akurat kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan.

Pemerintah mendukung komitmen terhadap keterbukaan informasi untuk publik. Hal ini selaras dengan UU KIP (2008) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan UU KIP 2008 ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap pengelolaan pemerintah. Penggunaan website merupakan salah satu contoh kongkrit pemanfaatan teknologi untuk publikasi informasi oleh pemerintah. Namun penerapan keterbukaan informasi publik pada pemerintah daerah belum optimal hal ini tercermin dari berbagai penelitian yang telah dilakukan. Penelitian Putera & Valentina (2010) di Pemerintahan Kota Padang menemukan bahwa upaya penerapan *e-government* dalam hal pemanfaatan website untuk publikasi informasi keuangan masih belum maksimal. Website pemerintah daerah Kota Padang masih digunakan terbatas untuk informasi objek wisata serta kegiatan kepala daerah. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Agustin (2014) menunjukkan bahwa terdapat 10 pemkab/pemkot Sumatera Barat yang belum menyediakan transparansi pengelolaan anggaran dan menu lainnya.

Berdasarkan latar belakang dan berbagai penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren transparansi laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2018 hingga 2020. Penelitian ini menganalisis tren keterbukaan informasi pada website pemerintah daerah. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses tidak hanya pada laporan kinerja atas fasilitas pelayanan namun juga atas seluruh detail laporan keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi

Keterbukaan informasi menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk berbagi kemudahan akses atas informasi laporan kinerja baik program kerja dan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada publik. Transparansi diartikan sebagai sebuah konsep terkait ketersediaan informasi, kemudahan akses serta dapat dipergunakan oleh masyarakat luas (De Araujo & Tedejo, 2016). Nurhayati (2017), mengemukakan bahwa transparansi merupakan proses kesediaan untuk menyajikan informasi keuangan secara terbuka, jujur kepada publik. Wujud transparansi adalah kemudahan akses atau kebebasan memperoleh informasi terkait pengelolaan pemerintahan baik informasi terkait program kerja, kebijakan, pelaksanaan serta pencapaian yang telah dilakukan. Transparansi atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan wujud implementasi *Good Corporate Governance*.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (2010) Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Transparansi memiliki tiga karakteristik yaitu informatif, keterbukaan dan pengungkapan. Suatu informasi dapat dikatakan transparan apabila informasi tersebut jelas, akurat, memberikan hak kemudahan kepada publik untuk mengakses, serta diungkapkan kepada publik (Mardiasmo, 2018). Konsep transparansi menunjukkan bahwa informasi penyelenggaraan pelayanan kinerja dipublikasikan secara legal, luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga tujuan transparansi dalam menyediakan informasi keuangan yang bebas dan terbuka akan terwujud. Ketersediaan informasi tersebut sebagai dasar ketaatan dalam penerapan *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian mengenai transparansi yang dilakukan oleh Novatiani, Kusumah, & Vabiani (2019) menunjukkan bahwa transparansi SKPD Kabupaten Bandung Barat sudah baik. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip transparansi pemerintah Bandung Barat dengan cara memberikan akses informasi kepada masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Al Ayyuby (2021) menemukan bahwa tingkat pengungkapan LKPD pemerintah daerah di Indonesia masih cenderung diangka rata-rata 48,22% dan belum sesuai dengan kriteria pengungkapan SAP. Hal ini dikarenakan belum ada pemerintah daerah yang mengungkapkan seluruh komponen LKPD secara detil 100%. Suwarjuwono & Ritonga (2017) menemukan bahwa tingkat pengungkapan akun persediaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa pada Tahun 2014 masih rendah dan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu hanya sebesar 40,3%.

Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah merupakan laporan evaluasi atas penggunaan sumber daya yang telah digunakan pemerintah daerah. Laporan keuangan ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya kepada publik. Publik memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah karena dana pemerintah daerah merupakan dana yang bersumber dari publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) laporan keuangan didefinisikan sebagai laporan posisi keuangan dan semua transaksi terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Penyediaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terkait kondisi keuangan serta seluruh transaksi dalam satu periode secara faktual. Selain itu, pemerintah daerah dituntut untuk menyajikan setiap komponen laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2005.

Penelitian tentang transparansi laporan keuangan dilakukan oleh Laswad., F. & Oyelere (2005) yang menemukan bahwa penyampaian laporan keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan media internet, selain itu pemerintah New Zealand memanfaatkan media internet tidak hanya untuk memberikan informasi keuangan namun untuk meningkatkan upaya transparansi dan akuntabilitas keuangan yang lebih besar kepada publik. Namun sebaliknya, penelitian Soepriyanto & Aristiani (2011) menunjukkan bahwa penerapan transparansi keuangan daerah masih sangat rendah tercermin hanya 14,5% website yang dapat di akses datanya dari 392 pemerintah daerah yang memiliki website. Lebih lanjut hanya terdapat 9 situs web atau 2,3% pemerintah daerah yang menyajikan informasi laporan keuangan sesuai SAP.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian tren analisis yang menguji tren transparansi laporan keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun 2018-2020. Sehingga sampel penelitian ini merupakan instansi pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2018-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder. Proses pengumpulan data penelitian dengan mengakses website instansi pemerintah daerah.

Indikator transparansi merupakan ketersediaan dan kemudahan akses dari seluruh komponen laporan keuangan daerah yaitu laporan neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan pada website instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Transparansi laporan keuangan daerah akan diukur dengan cara memberikan nilai 1 apabila instansi pemerintah daerah tersebut memberikan kemudahan akses dengan mempublikasikan seluruh komponen laporan keuangan di website. Sebaliknya, transparansi akan diberi nilai 0 apabila instansi pemerintah daerah tidak lengkap dalam mempublikasikan seluruh komponen laporan keuangan daerah. Teknik dan data analisis penelitian ini adalah tren analisis deskriptif. Penelitian ini menyajikan analisis deskriptif dari kecenderungan tren transparansi laporan keuangan yang terjadi di instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 5 instansi yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah Kabupaten Sleman, pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Seluruh instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki website yang cukup mumpuni dan mudah diakses oleh publik/masyarakat. Pada website pemerintah daerah tersebut tersaji berbagai informasi pemerintahan yang informatif dengan berbagai kemudahan akses. Dalam hal transparansi publikasi laporan keuangan, setiap pemerintah daerah memiliki ciri khas masing-masing dalam pemetaan kemudahan akses informasi tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwa transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tren pengungkapan laporan keuangan daerah di setiap website pemerintah daerah. Tabel 1 menunjukkan bahwa pemerintah kota Yogyakarta telah dengan baik melakukan transparansi laporan keuangan daerah sejak tahun 2018. Dalam hal ini pemerintah kota Yogyakarta, pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan pemerintah Kabupaten Sleman telah mempublikasikan seluruh detail laporan keuangan termasuk neraca, realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas di website pemerintah daerah. Transparansi ini memudahkan publik dalam mendapatkan informasi keuangan dan menganalisis sejauh mana kinerja pemerintah daerah tersebut dari tahun ke tahun.

Pada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, tren transparansi cenderung membaik. Pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Gunung Kidul belum sepenuhnya mempublikasikan laporan keuangan di website. Proses perbaikan transparansi terlihat pada Tahun 2019 dan 2020 pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah memberikan kemudahan akses bagi publik untuk melihat seluruh laporan keuangan daerah Gunung Kidul di websitenya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laswad., F. & Oyelere (2005) yang menemukan bahwa pemerintah New Zealand memanfaatkan media internet dengan sangat baik, tidak hanya untuk memberikan informasi keuangan namun juga untuk meningkatkan upaya

transparansi dan akuntabilitas keuangan yang lebih besar kepada publik.

Sementara itu, penelitian ini menemukan bahwa tren transparansi pemerintah Kabupaten Bantul kurang baik. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Bantul belum melaksanakan transparansi laporan keuangan dari tahun 2018-2020. Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya melakukan publikasi laporan keuangan di website. Hal ini tercermin dari minimnya kemudahan akses dari setiap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah daerah di website pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Hasil penelitian pemerintah daerah Bantul ini mendukung penelitian (Al Ayyuby, 2021), (Suwarjuwono & Ritonga, 2017), dan (Soepriyanto & Aristiani, 2011) yang mengemukakan bahwa penerapan transparansi masih rendah.

Tabel 1. Deskriptif Analisis Tren Transparansi Laporan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta

| No | Daerah | 2020 | 2019 | 2018 |
|----|-----------------|------|------|------|
| 1 | Kota Yogyakarta | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bantul | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kulon progo | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Gunung kidul | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Sleman | 1 | 1 | 1 |

Sumber: Data Diolah (2022)

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki tren dan pola tersendiri dalam penerapan transparansi laporan keuangan daerahnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, baik dari kecanggihan website yang disediakan maupun sumberdaya manusia pengelola pemerintah daerah.

SIMPULAN

Transparansi atas laporan keuangan merupakan salah satu wujud implementasi tanggungjawab instansi terhadap publik. Instansi pemerintah tidak hanya melaksanakan program kerja namun berkewajiban melaporkan hasil kinerja tersebut kepada publik dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan. Bentuk transparansi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan akses terhadap seluruh komponen laporan keuangan bagi masyarakat yang dipublikasikan di website instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menemukan tren transparansi laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat baik dari tahun ke tahun. Hanya saja tren transparansi ini belum dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah daerah kabupaten Bantul belum sepenuhnya mempublikasi seluruh komponen laporan keuangan pada websitenya.

Penelitian ini dapat menjadi sebuah gambaran bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan transparansi laporan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada luas lingkup wilayah tren analisis yaitu hanya dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saran untuk pengembangan penelitian berikutnya adalah untuk memperluas cakupan tren analisis transparansi laporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2014). Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website Pemkab/Pemkot di Provinsi Sumatera Barat. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*, A7-A12.
- Al Ayyuby, M. (2021). *Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- De Araujo, J. F., & Tedejo, R. F. (2016). Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 327-347.
- Laswad., F., F., & Oyelere, P. (2005). Detrminants of Voluntary Internet Fianncial reporting by local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol 2, No. 1.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Novatiani, A., Kusumah, R. R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 51-61.
- Nurhayati. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Trias Politika*, 36-54.
- Pemerintah, P. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2010). Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi Di Kabupaten Solok dan Padang). *Spirit Publik*, Vol. 6, No. 2, pp. 71-90.
- Republik Indonesia, U. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Soepriyanto, G., & Aristiani, R. (2011). Evaluasi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah di Situs Internet: Studi pada Pemerintah Daerah Indonesia. *Binus Business Review*, 192-201.
- Suwarjuwono, P., & Ritonga, I. (2017). Analisis Tingkat Pengungkapan Akun Persediaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 173-188.